

BAB I PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

Dalam berlakunya Instruksi Presiden (inpres) no 3 tahun 2003 tentang kebijakan dan pengembangan *E-Governance* dalam menyelenggarakan pemerintahan yang baik dan peningkatan layanan publik yang efektif dan efisien diperlukan adanya kebijakan dan strategi pengembangan e-government (Syah, 2003). Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) atau juga disebut *integrated government* adalah sebuah pemanfaatan teknologi informasi yang diterapkan pada sistem pemerintahan sebagai bentuk penyelenggaraan dan peningkatan pelayanan bagi masyarakat. SPBE dilaksanakan dengan prinsip efektivitas, keterpaduan, kesinambungan, efisiensi, akuntabilitas, interoperabilitas, dan keamanan. Kerangka kerja SPBE sesuai dengan PerPres Nomor 95 Tahun 2018, merupakan manajemen SPBE dan kerangka kerja yang digunakan dalam pelaksanaan tata kelola SPBE. Tata kelola SPBE diterapkan untuk memastikan penerapan unsur-unsur SPBE secara terpadu. maka dibutuhkannya berbagai inovasi digital untuk mendukung terwujudnya pengembangan layanan digital nasional memerlukan keterpaduan pembangunan dan pengembangan Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE) baik pada instansi pusat maupun pemerintah daerah. Pada Tabel I- 1 adalah indeks dari SPBE yang ada di Lombok Tengah.

Tabel I- 1 Indeks SPBE Lombok Tengah

Nama Indeks	Predikat
SPBE	2,37
Domain Kebijakan SPBE	1,90
Kebijakan Internal terkait Tata Kelola SPBE	1,90
Domain Tata Kelola SPBE	1,70
Perencanaan Strategis SPBE	1,50
Teknologi Informasi dan Komunikasi	2,00
Penyelenggara SPBE	1,50
Domain Manajemen SPBE	1,00
Penerapan Manajemen SPBE	1,00
Audit TIK	1,00
Domain Layanan SPBE	3,38
Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik	3,30
Layanan Publik Berbasis Elektronik	3,50

Berdasarkan indeks SPBE di Lombok Tengah dapat Membantu dalam mengembangkan domain Layanan SPBE, dalam aspek Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik yang sebelumnya sudah memiliki predikat 3,30 Indeks SPBE di Lombok Tengah secara keseluruhan saat ini memiliki predikat dengan total 2,37, jika dibandingkan dengan standard indeks SPBE di Indonesia, Lombok Tengah dapat dikategorikan berada dalam pencapaian yang cukup. Berdasarkan Peraturan Bupati Lombok Tengah Nomor 81 Tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas pokok dan fungsi Badan Kepegawaian, Pendidikan, Dan Pelatihan Kabupaten Lombok Tengah. dijelaskan tugas pokok dan fungsi Badan Kepegawaian, Pendidikan, Dan Pelatihan adalah membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan di bidang kepegawaian, pendidikan, dan pelatihan yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten(D. K. dan I. K. L. Tengah, 2016).

Pelayanan kepegawaian tidak bisa lepas dari regulasi baru manajemen kepegawaian yang mengatur mulai dari penyelenggaraan sampai dengan pensiun. Regulasi mengenai administrasi kepegawaian membutuhkan sistem standar yang sama untuk diterapkan baik ditingkat pemerintah daerah dan di Badan Kepegawaian Negara Kantor Regional maupun pusat Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat atas layanan kepegawaian pada Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Lombok Tengah atas layanan kepegawaian pada(IKM) :

Tabel I- 2 Indeks SPBE Lombok Tengah

Nilai Persepsi	Nilai Interval IKM	Nilai Interval Konversi IKM	Mutu Pelayanan	Kinerja Unit Pelayanan
1.	1,00 - 2,5996	25,00 – 64,99	D	Tidak Baik
2.	2,60 – 3,064	65,00 – 76,60	C	Kurang Baik
3.	3,0644 – 3,532	76,61 – 88,30	B	Baik
4.	3,5324 – 4,00	88,31 – 100,00	A	Sangat Baik

Dalam menjalankan kegiatan, terdapat beberapa permasalahan yang perlu diatasi pada badan kepegawaian pendidikan dan pelatihan Kabupaten Lombok Tengah yaitu :

1. Masih belum terwujudnya Profesionalisme pegawai dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.
2. rendahnya nilai profesionalisme pegawai dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.
3. Belum terwujudnya sepenuhnya kedisiplinan aparatur pemerintah daerah dalam melaksanakan fungsi hak dan kewajiban.
4. Masih terdapatnya kelemahan-kelemahan dalam pelayanan kepegawaian.

Dengan melihat permasalahan yang ada, maka harus diberikan solusi terkait kelemahan tersebut. Penggunaan teknologi informasi bisa menjadi solusi bagi permasalahan tersebut, sehingga kita bisa mencapai target visi dan misi yang berada di Kabupaten Lombok Tengah. Solusi untuk mengembangkan Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan di Kabupaten Lombok Tengah dapat menggunakan metode Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik(SPBE).

Maka, solusi atau *output* yang dihasilkan berfokus pada cetak biru (*blueprint*) arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik berdasarkan domain proses bisnis, domain data dan informasi, domain layanan ,domain Aplikasi ,domain Infrastruktur ,dan domain Keamanan untuk peningkatan administrasi kepegawaian pendidikan dan pelatihan tepat waktu. Sesuai dengan misi ke-3 yaitu “Pelayanan Umum Pemerintahan yang Mudah, Cepat dan Bersih” pada tujuan pemerintah Kabupaten Lombok Tengah “Terwujudnya Aparatur Sipil Negara yang professional, berintegritas dan berkinerja tinggi”

I.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat disimpulkan rumusan masalahnya adalah

1. Bagaimana menganalisis kebutuhan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik pada Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Lombok Tengah dengan *Framework* Togaf 9.2?

2. Bagaimana rancangan cetak biru (*Blueprint Enterprise*) arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik untuk upaya mengembangkan administrasi kepegawaian Kabupaten Lombok tengah?
3. Bagaimana Perancangan IT *Roadmap* sebagai pedoman untuk mengembangkan Administrasi Kepegawaian Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Lombo Tengah?

I.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Menganalisis kebutuhan sebagai kebutuhan sebagai Upaya pengembangan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik pada Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Lombok Tengah.
2. Melakukan perancangan cetak biru (*blueprint*) arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik untuk upaya pengembangan administrasi kepegawaian Kabupaten Lombok Tengah.
3. Menganalisis dan menghasilkan rancangan IT *Roadmap* sebagai pedoman untuk upaya membantu pengembangan Administrasi Kepegawaian Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Lombo Tengah.

I.4 Batasan Penelitian

Adapun Batasan pada penelitian ini adalah

1. Perancangan *enterprise* arsitektur ini dibuat berdasarkan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang tertera pada Peraturan Presiden (PerPres) Nomor 95 Tahun 2018 Tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).
2. Perancangan *enterprise* arsitektur ini dibuat berdasarkan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang tertera pada Surat Edaran Menteri PANRB No.18 Tahun 2022 Tentang Keterpaduan Layanan Digital Nasional Melalui Penerapan Arsitektur SPBE dan Peta Rencana SPBE.
3. Perancangan *enterprise* arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dibuat berdasarkan domain proses bisnis, domain data dan informasi, domain layanan ,domain Aplikasi ,dan domain Infrastruktur.

4. Penelitian ini menggunakan metode Enterprise Arsitektur dengan mengadopsi pendekatan TOGAF 9.2. Tahapan yang dilibatkan dalam penelitian ini meliputi *Preliminary Phase, Architecture Vision Phase, Business Architecture Phase, Information Architecture Phase, Technology Architecture Phase, Opportunities and Solutions Phase, dan Migration Planning Phase*.
5. Perancangan *enterprise* arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) pada pengembangan administrasi kepegawaian yang berada di Kabupaten Lombok Tengah, yang sesuai dengan tujuan pemerintah Kabupaten Lombok Tengah “Terwujudnya Aparatur Sipil Negara yang professional, berintegritas dan berkinerja tinggi” pada badan kepegawaian pendidikan dan pelatihan.

I.5 Manfaat Penelitian

Berdasarkan pembahasan dan pemahaman yang telah dipelajari, maka dapat diambil manfaat berdasarkan data yang ada pada Dinas yang ada di Kabupaten Lombok Tengah dan regulasi pemerintah sebagai berikut:

1. Memberikan masukan kepada Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan untuk menganalisis kebutuhan pada Administrasi Kepegawaian.
2. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan dukungan kepada Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan dengan merancang *Blueprint Enterprise Architecture* untuk program Administrasi Kepegawaian di Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Lombok Tengah.
3. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan dukungan kepada Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan dengan merancang *IT Roadmap* untuk program Administrasi Kepegawaian di Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Lombok Tengah.
4. Dengan adanya rancangan ini, memberikan kesempatan kepada penulis untuk memperluas pengetahuan dan wawasan mengenai perancangan arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Kabupaten Lombok Tengah.